

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan Otoda yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan sosok pegawai yang berkualitas.

Berdasarkan konsep Otoda tersebut, hal penting yang patut diingat adalah keberhasilan suatu bangsa dalam era persaingan ketat di masa depan ialah kemampuan beradaptasi bangsa itu sendiri, dimana hal ini ditentukan kemampuan sumber daya manusianya untuk berpikir kritis analitis dan profesional di bidangnya untuk lebih kompetitif mengejar ketinggalannya. Hal tersebut perlu didukung dengan berbagai piranti yang cukup multidimensional baik fisik maupun non fisik untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Salah satu piranti yang dapat mendukung kondisi bangsa saat ini adalah kedisiplinan para aparturnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang sangat fundamental dan signifikan terhadap keberhasilan suatu pemerintah untuk selalu mencari dan menemukan format baru dalam menyusun dan mengarahkan peningkatan kinerja pemerintah yang efektif dan efisien dengan memperhatikan kinerja *public accountability* dan *responsibility* (Islamy, 1998, h.2)

Aparatur merupakan unsur yang paling penting bagi kelancaran pembangunan karena manusialah pelaksana dan penghasil kerja yang dituntut mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Oleh karena